



---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR: 20.b TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, guna mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal dan profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Wajo Nomor 170);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);
15. Peraturan Bupati Wajo Nomor 24 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 24);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Wajo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 23);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU :
- : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo dan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :
- : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktuk KESATU, adalah:
1. Atasan PPID Pelaksana.
    - a. mengkoordinasikan, menyediakan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo;
    - b. menerima pengajuan keberatan yang disampaikan oleh pemohon informasi publik dan mengikuti proses atas sengketa informasi publik yang diajukan oleh pihak pemohon; dan
    - c. membuat laporan, melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
  2. PPID Pelaksana
    - a. Mengklasifikasi informasi yang terdiri dari:
      - 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
      - 2) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
      - 3) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat; dan
      - 4) informasi yang dikecualikan.

- b. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo;
  - c. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo;
  - d. melakukan verifikasi bahan informasi publik di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo;
  - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo;
  - f. menyediakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo untuk dapat diakses secara luas oleh masyarakat;
  - g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
  - h. memberikan tanggapan dan jawaban atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik; dan
  - i. menyusun laporan tentang pengelolaan informasi publik di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo kepada PPID Utama secara berkala melalui Atasan PPID Pelaksana.
3. Bidang Pendukung Sekretariat
    - a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; dan
    - b. Memfasilitasi penyiapan dokumen laporan dan evaluasi.
4. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
    - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
    - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
    - c. Mengumpulkan dan menyusun laporan tentang layanan informasi publik;
    - d. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
    - e. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik;
    - f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
    - g. Mengelola dokumen dan arsip informasi publik.
5. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
    - a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik (DIP);
    - b. Memutakhirkan dan mengajukan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik kepada PPID Pelaksana;
    - c. Menyusun dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik yang dikelola;
    - d. Menyiapkan informasi publik yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat; dan

- e. Melaksanakan proses diseminasi melalui berbagai media;
  - f. Menyiapkan informasi publik yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
6. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi
- a. Memberikan masukan kepada atasan PPID Pelaksana melalui PPID Pelaksana terhadap keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
  - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasi serta uji konsekuensi informasi publik; dan
  - d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal, 2 Januari 2026



Tembusan:

1. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Wajo di Sengkang;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Wajo di Sengkang;
4. Masing-masing yang bersangkutan di Sengkang;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NOMOR : 20.b TAHUN 2026

TANGGAL : 2 Januari 2026

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA DI LINGKUNGAN  
BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN WAJO  
TAHUN 2026

SUSUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN 2026

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM PPID PELAKSANA</b>	<b>JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH</b>
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3	Bidang Pendukung Sekretariat	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
4	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
	Koordinator	Kabid Pelayanan, Pengelolaan, Pengawasan Pajak Daerah Lainnya
	Anggota	1. Kasubid Pemungutan, Penagihan dan Keberatan
		2. Kasubid Pendataan dan Pendaftaran
5	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	Koordinator	Kabid Akuntansi dan Pelaporan
	Anggota	1. Kasubid Akuntansi
		2. Kasubid Pelaporan Keuangan
3. Pejabat Fungsional		

NO	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
6	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	
	Koordinator	Kabid Perbendaharaan dan Pengendalian Otorisasi DPA
	Anggota	1. Kasubid Verifikasi 2. Kasubid Otorisasi DPA 3. Kasubag Umum & Kepegawaian 4. Penelaah Teknis Kebijakan
7	Admin Pengelola PPID	JUMIGRAH


  
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Pendapatan Daerah  
ANDI PALLAWARUKKA, S.IP., M.IP  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19700815 199003 1 003

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

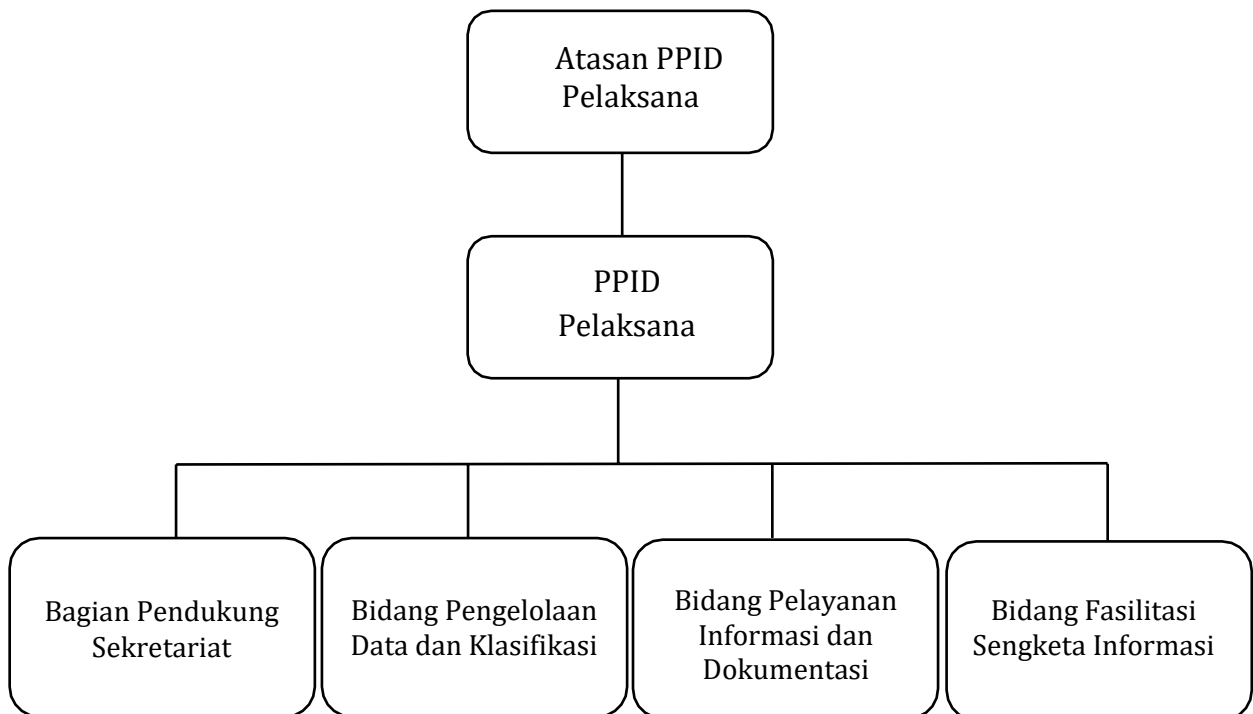
NOMOR : 20.b TAHUN 2026

TANGGAL : 2 Januari 2026

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA DI LINGKUNGAN  
BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN WAJO  
TAHUN 2026

**STRUKTUR ORGANISASI**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2026**



Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Pendapatan Daerah  
**ANDI PALLAWARUKKA, S.IP., M.IP**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP: 19700815 199003-1 903